

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Marhaendra Wira Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Public*, (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013)
- Safi Nugraha, *et.al, Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)
- Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus, 2018)
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015)
- Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019)
- Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)

Jurnal :

- Adityo Susilo, *et.al*, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No.1, (2020): 45-67. DOI: <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Elias Hence Thesia, “Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Masa Pandemi Covid-19”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 4, No.1, (2021): 81-97, DOI: <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.12202>
- Franciscus Xaverius Wartoyo dan Teguh Prasetyo, “Problematika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Hukum Keadilan Bermartabat” *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, Vol. 5, No. 2, (2021): 187-194. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2021.005.02.9>

- Ida Bagus Brahmana dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Penindakan Terhadap masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan baru Di Provinsi Bali”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 8, No. 8, (2020): 1-8. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66715>
- Ni Luh Gede Astariani, “Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan” Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 4, (2015) : 688-699. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p08>
- Suhariono AR, “Penentuan Sanksi Dalam Suatu undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4, (2009): 615-666. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337>
- Sulistya Choirunnisa, “Coronavirus Desease 2019 (COVID- 19) Dalam Perspektif Filsafat Ilmu”, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 3, (2020): 536-546. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i3.536-546>
- Zuleha, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa” Jurnal hukum Samudera Keadilan, Vol. 16, No. 1, (2021): 98-111. DOI : [10.33059/jhsk.v16i1.3186](https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3186)

Website:

- AN Uyung Pramudiarja, “Bandel! Sepanjang 2020, Cuma 20 Persen yang Patuh Pakai Masker”. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5317125/bandel-sepanjang-2020-cuma-20-persen-yang-pakai-masker>, diakses pada 9 September 2021
- Arif Chrisnoto Soebroto, “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas”. https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf, diakses pada 10 Oktober 2021

Elsam, “Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf>, diakses pada 22 April 2021

Indonesia, Satgas Covid- 19, “Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan”. <https://covid19.go.id/monitoring-kepatuhan-protokol-kesehatan> diakses pada, 29 November 2021

Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”., https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf, diakses pada 22 April 2021

Samuel Lantu, “Proses Hukum PPKM Darurat Jangan Langsung Denda, Ridwan Kamil: Apalagi Bagi Golongan Ekonomi Jalanan”. <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1132232478/proses-hukum-ppkm-darurat-jangan-langsung-denda-ridwan-kamil-apalagi-bagi-golongan-ekonomi-jalanan> diakses pada, 8 Desember 2021

Makalah :

Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM”. Makalah, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1

Wawancara :

Wawancara dengan Ipda Fitri Astuti, KBO Sat. Reskrim Polres Tangerang Selatan, *via text*, 19 Januari 2022.

Wawancara dengan Longginus Hadi, Narasumber Pelatihan Sub Bidang pelatihan bidang koordinasi relawan Satgas COVID- 19, 8 Januari 2022, Pukul 11.30 WIB.

Peraturan Perundangan :

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003)

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72023)

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)

Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 2788/ Pid.C./ 2020/ PN. Blt.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 171/Pid.Sus/2021/PT DKI